

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati ME, Sasongko G, Therik MA. 2018. Dynamics of the tenurial conflict in state forest area (case in BKPH tanggung KPH semarang). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* **6(2)**: 112-120.
- Auliyah R. 2014. Studi fenomenologi peranan manajemen masjid at-taqwa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat bangkalan. *Jurnal Studi Manajemen* **8(1)**: 74-91.
- Awang SA. 2008. Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). French Agricultural Research Centre for International Development, Bogor.
- Ceanturi A. 2021. Politik penguasaan lahan garapan dalam pengelolaan Hutan Wengkon Desa Pitu di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Universitas Gadjah Mada. Skripsi (Tidak dipublikasikan). Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Corolina LC, Saleh SC. 2015. Implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* **2(2)**: 224–229.
- Creswell JW. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Darman RA. 2017. Analisis aktor, relasi kuasa dalam pembangunan dan pengelolaan Hutan Desa Labbo. Skripsi. Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Dewi IN, Andayani W, Suryanto P. 2018. Karakteristik petani dan kontribusi Hutan Kemasyarakatan (Hkm) terhadap pendapatan petani di Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Kehutanan* **12(1)**: 86-98.
- Fatchan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jengjala Pustaka Utama, Surabaya.
- Febriyano IG, Febriyano, Safe'i R, *et al.* 2018. 'Performa pengelolaan agroforestri di wilayah kesatuan pengelolaan Hutan Lindung Rajabasa. *Jurnal Hutan Tropis* **5(2)**: 127-133.
- Fedora SD, Hudiyono RF. 2019. Analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada unit hubungan masyarakat dan kesekretariatan PT Semen Padang. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* **2(1)**: 38-46.
- Harun, Kristiadi M, Dwiprabowo H. 2014. Model resolusi konflik lahan di kesatuan pemangkuan hutan produksi model Banjar. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* **11(4)**: 265-280.
- Haryani R, Rijanta R. 2019. Ketergantungan masyarakat terhadap hutan lindung dalam program hutan kemasyarakatan. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan* **2(2)**: 15-15.
- Haryanto RV, Tjoa M, Marasabessy H. 2019. Hak tenurial masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. *Makila* **13(2)**: 139–149.
- Hidayati HN, Dharmawan AH, Pandjaitan NK. 2017. Analysis of political economy power to access land forest (the case of three communities in production forest Tebo District Jambi. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* **5(2)**: 98-105.

- Huberman A, Miles MB. 1984. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hughes M, Kroehler CJ, Zanden JWV. 2002. Sociology; the Core. The McGraw-Hill Companies Inc, New York (US).
- Kristin Y, Qurniati R, Kaskoyo H. 2015. Interaksi masyarakat sekitar hutan terhadap pemanfaatan lahan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. *Jurnal Sylva Lestari* **6(3)**: 1-8.
- Kuswendi U, Trilaksana A. 2015. Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat di BKPH Kemlagi kesatuan pemangkuan hutan Mojokerto tahun 2001 – 2007. *Avatara* **3(1)**: 170–177.
- Leuwol NV, Gasperz S. 2020. Perubahan karakter belajar mahasiswa di tengah pandemik covid 19 (tinjauan sosio-psiko terhadap perubahan karakter belajar mahasiswa di tengah pandemik covid-19, di Kota Sorong, Papua Barat). *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya* **4(1)**: 32-44.
- Lewerissa E. 2015. Interaksi masyarakat sekitar hutan terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan di Desa Wangogira, Kecamatan Tobelo Barat. *Jurnal Agroforestry* **10(1)**: 45-56.
- Luthan S. 2007. Hubungan hukum dan kekuasaan. *Jurnal Hukum* **2(14)**: 166 – 184.
- Lynch M. 1993. Scientific Practice and Ordinary Action: Ethnomethodology and Social Studies of Science. Cambridge University Press, Cambridge.
- Markum, Latifah S, Setiawan B. 2017. Identifikasi pengaruh luas lahan, biaya pemeliharaan, dan jumlah keluar terhadap pendapatan petani: Studi kasus di Desa Kepenuhan Raya. *Jurnal Sangkareang Mataram* **3(4)**: 56–62.
- Mutolib Abdul, Yonariza, Mahdi, *et al.* 2015. Konflik agraria dan pelepasan tanah ulayat (studi kasus pada masyarakat Suku Melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat). *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* **12(3)**: 213-225.
- Nambo AB, Puluuluwa MR. Memahami tentang beberapa konsep politik. Suatu Telaah dari Sistem Politik **21(2)**: 265-266.
- Nugroho AF, Ichwandi I, Kosmaryandi N. 2017. Analisis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (studi kasus hutan pendidikan dan latihan Gunung Walat. *Journal of Env. Engineering & Waste Management* **2(2)**: 51–59.
- Nurhalimah S. 2014. Kajian interaksi masyarakat dengan sumberdaya hutan di Bkph Kemadoh, Kph Randublatung. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/72756>.
- Nurfirdaus N, Risnawati. 2019. Studi Tentang Pembentukan Kebiasaan dan Perilaku Sosial Siswa (Studi Kasus di SDN 1 Windujaten). *Jurnal Lensa Pendas* **4(1)**: 36-46.
- Redi A. 2019. Urgensi pembentukan peraturan daerah Provinsi Bali mangrove berlandaskan kearifan lokal. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* **3(1)**: 32–42.
- Ribot JC, Peluso NL. 2003. A theory of access. *Rural Sociology Society* **68(2)**: 153–181.

- Rudangga IGNG, Sudiarta GM. 2016. Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. *E-Jurnal Manajemen Unud* **5(7)**: 4394 – 4422.
- Sawitri R, Suharti S, Karlina E. 2011. Interaksi masyarakat dengan hutan dan lingkungan sekitarnya di kawasan dan daerah penyangga Taman Nasional Kutai. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* **8(2)**: 129-142.
- Sinabutar F. 2015. Penataan Tenurial dan Peran Para Pihak dalam Mewujudkan Legalitas dan Legitimasi Kawasan Hutan Negara. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Subadi T. Metode Penelitian Kualitatif. 2006. Penerbit Muhammadiyah University Press, Sukoharjo.
- Subairi A, Suharso P, Sukidin. 2021. Implementasi program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (Phbm) pada Perum Perhutani kesatuan pemangku hutan (Kph) Jember (studi kasus pada lembaga masyarakat desa hutan (Lmdh) Wana Jaya Negara Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi* **15(1)**: 152–161.
- Sulistiani SN. 2014. Kajian Pemanfaatan sumberdaya hutan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak oleh masyarakat. Skripsi. Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Sumanto, Edi S, Sujatmoko S. 2008. Kajian konflik pengelolaan KHDTK hutan penelitian Hambala-Sumba Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* **5(3)**: 165-178.
- Susetyo PD. 2021. Seputar Hutan dan Kehutanan. IPB Press, Bogor.
- Suwarno E. 2014. Analisis kelembagaan proses operasional KPH: studi Kasus KP hutan produksi Tasik Besar Serkap di Provinsi Riau. Skripsi. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Sylviani, Dwiprabowo H, Yosefi SE. 2014. Kajian kebijakan penguasaan lahan dalam kawasan kesatuan pengelolaan hutan (Kph) di Kabupaten Lampung Selatan. *Analisis Kebijakan Kehutanan* **11(1)**: 54–70.
- Ter Haar. 1960. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Praditya, Jakarta.
- Tjoa M, Suharjito D, Kartodiharjo H, *et al.* 2018. Hak penguasaan lahan hutan pada masyarakat adat di Desa Honitetu Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. *Jurnal Sylva Lestari* **6(3)**: 91–102.
- Wahanisa R. 2015. Model pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Yustisia *Jurnal Hukum* **4(2)**: 416–438.
- Wibowo RF, Rostyaningsing D. 2016. Analisis aktor implementasi dalam kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Semarang (studi kasus di Kecamatan Gunungpati). *Journal of Public Policy and Management Review* **5(4)**: 17-32.
- Zulkarnain. 2013. Analisis penetapan kriteria kawasan hutan. *Jurnal Agrifor* **7(2)**: 96–109.

Peraturan – Peraturan

Departemen Kehutanan. 1999. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dephut. Jakarta.

Surat Keputusan Dewan Pengawasan Perum Perhutani No 136/KPTS/DIR/2001 tentang PHBM.

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 849/KPTS/DIR/1999 tentang Pedoman Pengkajian Desa Secara Partisipatif.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.632/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan Universitas Gadjah Mada, di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur Seluas 10.901

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.34/Menhut-II/2013 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.15/Menlhk/Setjen/kum.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MenhutII/2013 Tentang Pengaturan Tata Batas KHDTK.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.